

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Aplikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, mempermudah kehidupan sehari-hari, serta mendukung berbagai kegiatan, baik di ranah bisnis, pendidikan, hiburan, atau pemerintahan.

Pemerintahan daerah DKI Jakarta memiliki beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian integral dalam struktur pemerintahan daerah DKI Jakarta. Setiap OPD memiliki peran dan fungsi spesifik dalam menjalankan berbagai program dan inisiatif yang mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah [1]

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Untuk pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta, bendahara umum dari masing-masing daerah membuka rekening kas umum pada bank daerah DKI Jakarta. Bank daerah DKI Jakarta merupakan wadah sebagai pengelola kas daerah yang dimana harus mampu menyediakan informasi transaksi keuangan yang diperlukan [2]. Hal ini membuat pemerintah daerah membutuhkan aplikasi yang dapat melakukan operasi Rancangan Keuangan Daerah di DKI Jakarta.

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah DKI Jakarta membutuhkan perangkat lunak dalam menjalankan tugas apalagi dalam menjalankan keuangan daerah. Dikarenakan dalam proses pengelolaan keuangan daerah, selalu terdapat masalah pencatatan data yang cenderung tidak sesuai dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta data jarang diperbaharui, perangkat lunak menjadi semakin krusial dalam menangani tantangan ini. Pencatatan data yang tidak sesuai dan kurangnya pembaruan data dapat mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Dalam beberapa kasus, perbedaan dalam pencatatan data antar-SKPD dapat membingungkan, dan bisa menyulitkan koordinasi dan kerja sama lintas-sektor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang isinya pencatatan dan sistem kerja pengelolaan daerah di Ibu Kota DKI Jakarta [3].

Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta perlu mengandalkan perangkat lunak yang andal dan terintegrasi, seperti aplikasi SIPD berbasis web yang dikembangkan oleh PT. Tabel Data Informatika, untuk mengatasi masalah ini. Aplikasi ini dapat memungkinkan pengelolaan data keuangan yang terpusat dan terintegrasi, memastikan konsistensi dalam pencatatan, serta memungkinkan pembaruan data yang lebih cepat. Sebagai mahasiswa yang sedang menjalani magang sebagai *fullstack developer*, penulis memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ini. Dalam situasi saat ini, penulis dapat melihat secara langsung bagaimana aplikasi ini bekerja dan membantu Pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah dan Solusi

Berdasarkan latar belakang. Berikut merupakan rumusan masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang database dan merancang aplikasi SIPD untuk membantu dalam pengelolaan daerah?
2. Bagaimana cara implementasi aplikasi sesuai rancangan aplikasi yang efektif untuk membantu pengelolaan daerah?

Adapun solusi yang dapat diselesaikan untuk mengatasi perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Merancang sistem aplikasi sesuai analisis kebutuhan pengguna tentang pengelolaan daerah dan membuat database yang memadai dan efektif.
2. Melakukan implementasi yang efektif dengan memastikan integrasi antara database dan aplikasi berjalan dengan baik.

1.3 Tujuan

Berikut tujuan dari pembangunan aplikasi SIPD sebagai berikut :

1. Dapat mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam memonitor keuangan pemerintah DKI Jakarta.
2. Membantu menjalankan program-program pemerintahan dengan lebih terstruktur dan efisien melalui sistem yang dirancang sesuai dengan analisis kebutuhan pengguna.
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan membuat database yang memadai dan efektif serta memastikan integrasi yang baik antara database dan aplikasi.

Dengan demikian, aplikasi SIPD diharapkan dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

1.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah sehingga pembahasan dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut :

- a) Pembahasan laporan ini dibatasi pada penggunaan fitur LPJ (Lembar Pertanggung Jawaban), yang dirancang untuk membantu perangkat daerah dalam menyiapkan, memvalidasi, dan menyimpan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan anggaran oleh Pemerintah DKI Jakarta.
- b) Ruang lingkup laporan tidak mencakup pengembangan fitur lain di luar LPJ, analisis mendalam mengenai keamanan data secara keseluruhan aplikasi SIPD, kecuali yang terkait langsung dengan fitur LPJ, serta integrasi aplikasi dengan sistem eksternal di luar lingkup Pemerintah DKI Jakarta.

1.5 Penjadwalan Kerja

Dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan magang yang berlaku di PT Tabel Data Informatika. Tabel 1.1 adalah gambaran jadwal kerja selama kegiatan magang sebagai *Fullstack Developer* .

Tabel 1.1 Penjadwalan Kerja Bulan Juli - Oktober

No.	Deskripsi Kerja	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Diskusi Penjelasan Modul aplikasi LPJ (Lembar Pertanggungjawaban)																
2	Mengatur flow aplikasi LPJ																
3	Pengerjaan login LPJ dan laporan buku besar																
4	Pengujian login dan laporan buku besar																

Tabel 1.2 Penjadwalan Kerja Bulan November - Februari

No.	Deskripsi Kerja	November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Diskusi Fitur Jurnal eliminasi																
2	Merancang query database jurnal eliminasi																
3	Pengerjaan aplikasi LPJ fitur jurnal eliminasi																
4	Pengujian fitur jurnal eliminasi																

Tabel 1.3 Penjadwalan Kerja Bulan Maret - Mei

No.	Deskripsi Kerja	Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Diskusi Fitur Proses Laporan Keuangan												
2	Merancang query dan membuat procedure untuk setiap jenis laporan keuangan												
3	Pengerjaan aplikasi LPJ fitur proses laporan keuangan												
4	Pengujian												